

### Pneumonia

Kementerian Kesehatan meminta semua jajarannya siaga menyusul laporan WHO terkait peningkatan kasus *undefined* pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok Utara. Belum diketahui secara pasti penyebab penyakit ini, namun berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus *mycoplasma pneumoniae* sebesar 40 persen. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian *Mycoplasma* Pneumonia di Indonesia. Tujuannya mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) diminta untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus

dan negara terjangkit di tingkat global serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus dicurigai pneumonia.

### Kota Sehat

Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan Swasti Saba Wiwerda kepada Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin karena membawa Banjarbaru sebagai Kota Sehat 2023. Penghargaan itu wujud keberhasilan dan komitmen Pemerintah Kota memberikan pelayanan maksimal dan berkualitas di bidang Kesehatan. Pemkot Banjarbaru mampu merealisasikan berbagai program dan inovasi pada bidang kesehatan sehingga layak meraih predikat sebagai Kota Sehat 2023. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam upaya mewujudkan kota sehat. Budi mengatakan kualitas kesehatan setiap daerah semakin baik sehingga mendorong meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh.

### Demam Berdarah

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan anomali kasus dengue di Yogyakarta yang turun di bawah *incident rate* global 10 per 100.000 populasi disebabkan oleh implementasi program penelitian bakteri Wolbachia dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia mengatakan insiden *rate* dengue di Indonesia terus menjauh dari standar dunia sejak 1968, walaupun intervensi seperti *fogging* atau pengasapan, larvasida/abate, hingga 3M Plus telah dicoba. Insiden *rate* dengue di Indonesia saat ini berada pada angka 28,5 per 100.000 populasi. Bahkan, angka tersebut di Yogyakarta pernah menyentuh 300 sampai 400 per 100.000 populasi. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes RI melaporkan laju kasus dengue di Indonesia rata-rata mencapai 74.000 hingga 140.000 per tahun.

### Stunting

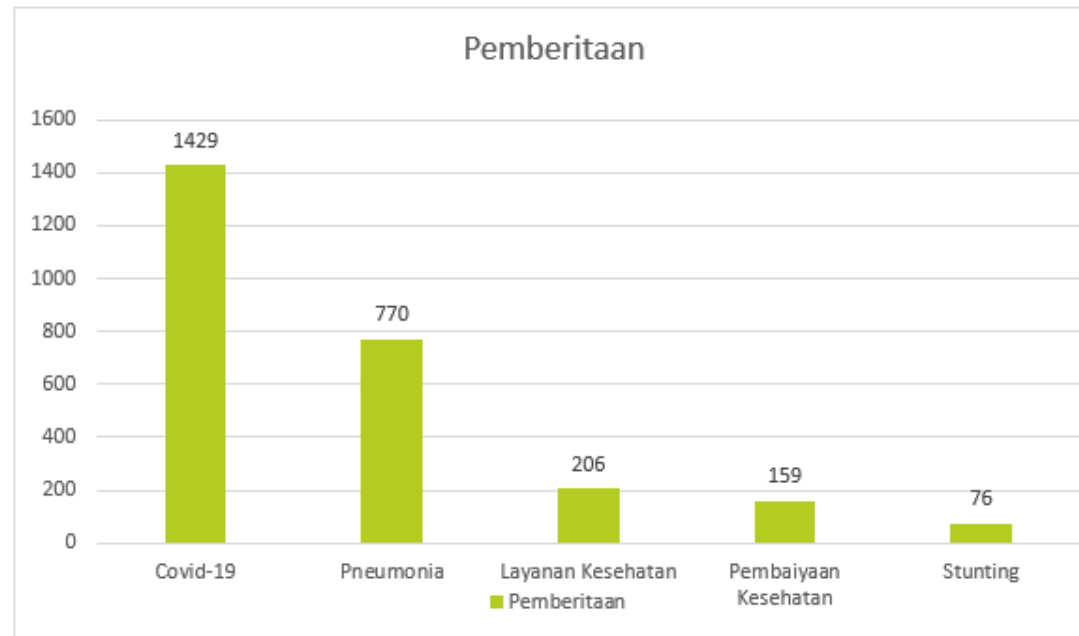
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program penanganan stunting di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Pemerintah pusat hanya bisa melakukan advokasi serta pengarahan kepada dinas kesehatan dan kepala daerah untuk terus melakukan peningkatan layanan. Sebagai contoh, Menkes menanggapi kasus menu viral pembagian menu stunting di bawah standar yang ada dalam wilayah Kota Depok. Ia telah mendorong dan mendapat laporan bahwa wali kota Depok dan Dinas Kesehatan setempat sudah melakukan perbaikan.

### Mpox

Kementerian Kesehatan RI merespons prediksi yang menyebut, Mpox di Indonesia sebetulnya sudah mencapai seribu kasus, menyusul laporan satu pasien meninggal. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti NadiaTarmizi, potensi tersebut memang tidak bisa dipungkiri. Dalam satu tahun, bahkan estimasinya dengan laju penularan Mpox saat ini, sudah mencapai lebih dari 3 ribu kasus. Fenomena semacam ini terjadi saat infeksi atau penyakit menyebar di kelompok berisiko.

### Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu Pneumonia yang menekankan pada Kementerian Kesehatan meminta semua jajarannya siaga menyusul laporan WHO terkait peningkatan kasus *undefined* pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok Utara. Isu ini dapat dijadikan rujukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak Upaya Kesehatan.



## Covid-19

Epidemiolog Dicky Budiman menyebut kasus infeksi Covid-19 mulai melonjak di banyak negara. Khususnya terjadi di Eropa, Amerika dan Asia. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, di Indonesia saat ini juga turut mengalami peningkatan kasus hingga 90 persen di DKI Jakarta. Peningkatan kasus infeksi Covid-19 dinilai, akibat munculnya varian baru dengan nama JN.1. Varian kali ini lebih mudah menginfeksi dan mampu menempel lebih lama di sel dan sulit untuk diproteksi. Varian JN.1 mudah bermutasi. Pasalnya dari hasil riset yang ia miliki menyatakan varian JN.1 mempunyai angka reproduksi yang relatif tertinggi dibanding subvarian Covid-19 dalam waktu satu tahun terakhir. Walau munculnya varian JN.1 ini terkesan ganas dan mematikan, masyarakat masih bisa menangkal penyebarannya dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan menjaga jarak. Ditambah lagi bulan Desember ini sudah memasuki fase libur.

Langkah lainnya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan infeksi varian JN.1 adalah menggunakan vaksin booster. Vaksinasi tipe booster cukup efektif untuk mencegah kematian akibat kemunculan varian JN.1 tersebut. Walakin persentasenya belum bisa dijabarkannya, namun untuk pencegahan tetap bisa dilakukan.

## Pneumonia

Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, Kemenkes terus melakukan penelusuran kasus untuk merancang langkah preventif. Indonesia sudah pernah menangani kasus ini dan obat untuk penyembuhan bakteri *mycoplasma pneumonia* sudah tersedia di Indonesia. Gejalanya hampir mirip dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada umumnya. Biasanya ditandai dengan demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri dada, dan lemas. Batuk inilah yang paling mengganggu karena dapat menetap hingga 3 minggu. Namun dibanding virus Covid-19 atau virus influenza, keparahan virus ini jauh lebih rendah. Bahkan, literatur luar negeri, menyebut *mycoplasma pneumonia* sebagai *walking pneumonia*.

## Layanan Kesehatan

Kantor BPJS menginginkan tidak ada lagi diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum, semuanya harus mendapatkan layanan dalam waktu dan tempat yang sama. Pihak rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah berkomitmen wajib melaksanakan janji layanan yang sudah ditandatangani. Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan di samping sudah mencapai *Universal Health Coverage* atau UHC, target berikutnya adalah transformasi mutu layanan. Target kita sekarang adalah transformasi mutu layanan sehingga mutu layanan itu yang kami perhatikan, masyarakat lebih cepat dilayani, tidak diskriminatif, mudah dan setara,

## Pembiayaan Kesehatan

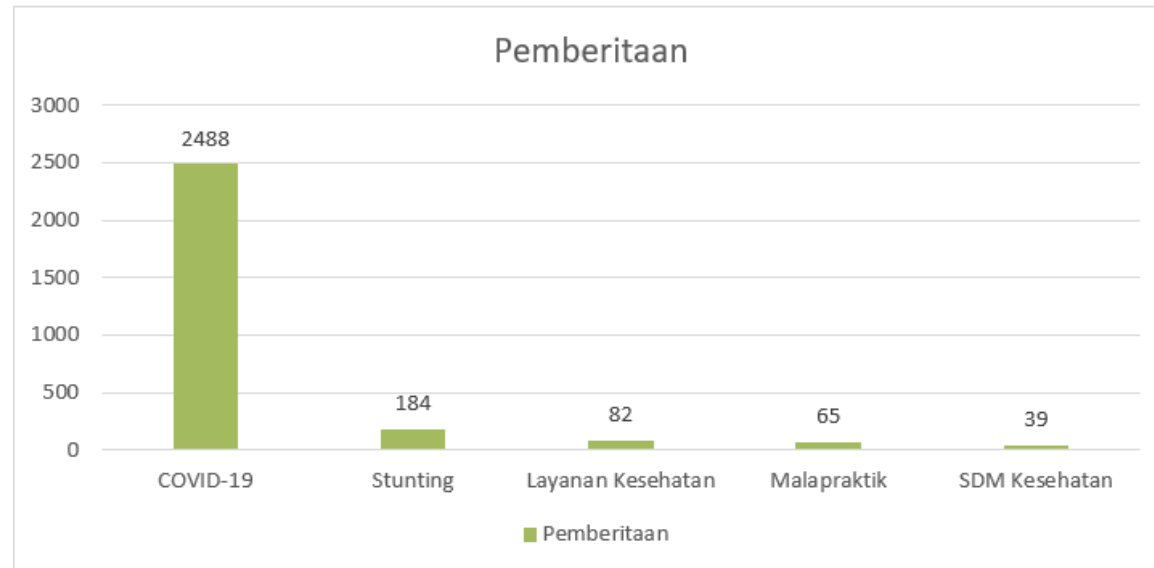
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menemukan adanya dugaan *fraud* atau kecurangan pada fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) yang terafiliasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan nilai mencapai Rp866 miliar pada tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan kecurangan tersebut terdiri atas berbagai modus, seperti *excessive usage* atau penggunaan untuk hal yang tidak perlu dan *phantom billing* atau klaim palsu tanpa disertai tindakan atau pasien bodong. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengungkapkan BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah sanksi seperti peringatan serta penguatan ekosistem anti *fraud* dari dalam guna mencegah terjadinya hal tersebut.

## Stunting

Dr. drg. Widya Leksmanawati Habibie Sp.Ort., MM., Direktur Eksekutif Habibie *Institute Public Policy and Governance* (HIPPG), menyampaikan dukungan untuk upaya mendorong pemerintah agar segera mengakselerasi penetapan kebijakan yang mendukung intervensi gizi spesifik. Hal ini sebagai langkah penting dalam percepatan pencegahan stunting guna mencapai target nasional yang menetapkan tingkat stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

## Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu Covid-19 yang menekankan pada Epidemiolog Dicky Budiman menyebut kasus infeksi Covid-19 mulai melonjak di banyak negara. Khususnya terjadi di Eropa, Amerika dan Asia. Isu ini dapat dijadikan rujukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak Upaya Kesehatan.



## Covid-19

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melaporkan situasi COVID-19 di Indonesia mengalami tren peningkatan terutama pada 21 provinsi dalam kurun beberapa pekan terakhir. Kemenkes meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) mewaspadaai kasus COVID-19. Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Lonjakan Kasus COVID-19 yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menerangkan, situasi COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan adanya peningkatan tren kasus. Adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19.

## Stunting

Kemenkes menyatakan bahwa pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil dapat mencegah bayi terlahir prematur dan stunting. "Pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja perempuan itu untuk mengurangi risiko anemia, karena berdasarkan data masih ada 48,9 persen ibu hamil dengan anemia. Ibu hamil juga perlu rutin mengonsumsi TTD untuk mencegah anak terlahir prematur dan stunting," terang Lovely Daisy Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kemenkes.

## Layanan Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperluas penggunaan alat ultrasonografi (USG) di Indonesia untuk mencegah kematian bayi saat melahirkan. Alat USG kandungan sekarang telah tersedia di 10.000 puskesmas, untuk mengatasi masalah ketidakterersediaan di sebagian besar tempat. Menkes menyatakan bahwa penambahan alat ini diinisiasi setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar USG dapat diakses secara luas di puskesmas. Selain mendeteksi kondisi bayi dalam kandungan, USG juga dapat digunakan untuk deteksi dini penyakit kanker payudara dan sakit jantung, menjadi inovasi yang signifikan untuk meningkatkan pelayanan, kesehatan di Indonesia.

## Malapraktik

Kasus dugaan malapraktik yang menimpa seorang bayi usia 15 bulan di Jambi tengah diselidiki. Kasus ini terjadi pada 9 September 2023, namun baru dilaporkan ke Polda Jambi pada 24 Oktober 2023. Bayi atas nama Alfatih Rizki Ananda itu meninggal dunia. Pihak kepolisian akan melakukan jemput bola dengan mendatangi RS Royal Prima Jambi untuk meminta klarifikasi kepada tim medis serta juga akan meminta keterangan ahli medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dugaan

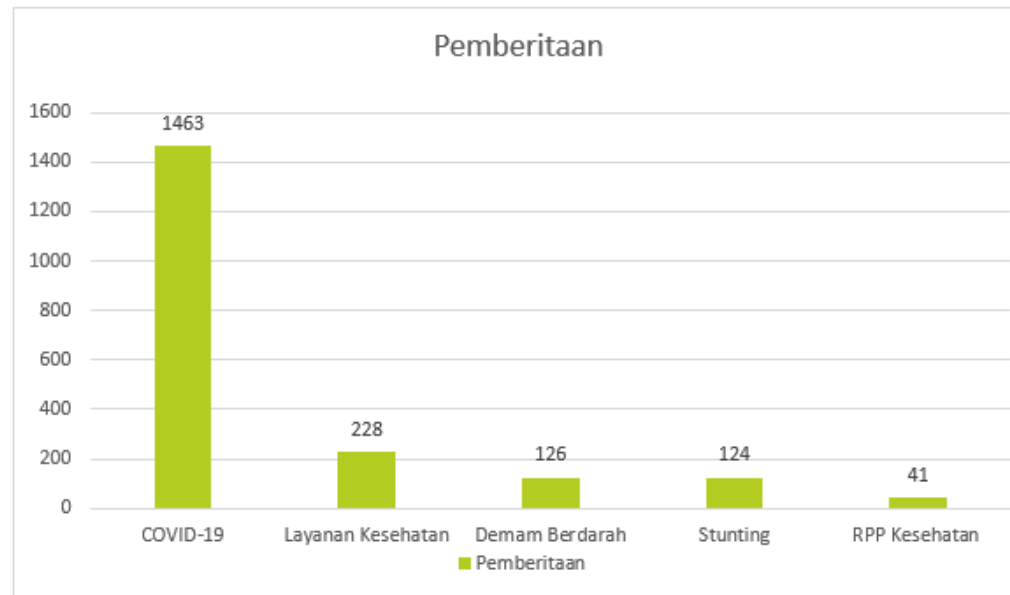
malapraktik ini. Kronologi Kasus Dugaan Malapraktik, awalnya Alfatih mengalami panas demam hingga kejang-kejang. Kemudian di ICU, oleh perawat dimasukkan selang melalui mulut untuk mengambil lendir. Namun pada proses pemasangan selang itu, saksi menyebut bahwa pasien bayi mengeluarkan darah. Namun belum diungkapkan secara detail kondisi yang menyebabkan bayi tersebut berdarah.

## SDM Kesehatan

Para nakes dan tenaga medis RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon telah berdemo untuk menuntut pembayaran jasa pelayanan mereka yang belum diterima selama tiga tahun, mencapai total Rp 26 miliar. Mereka mengeluhkan ketidaksesuaian data antara bagian keuangan dan tenaga medis, terutama terkait layanan Medical Check-Up (MCU) tahun 2021. Selain itu, mereka mempertanyakan honor Tim JKN RSUD pada 2022–2023, dengan beberapa dokter hanya menerima pembayaran hingga September 2023. Meskipun dijanjikan pencairan dalam satu atau dua hari, para nakes masih kesal karena janji pembayaran hak mereka belum juga terpenuhi, sementara stok obat menipis dan hutang RS tetap banyak. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpastian di kalangan tenaga medis dan pegawai RSUD Dr. M. Haulussy.

## Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu Covid-19 yang menekankan pada Kementerian Kesehatan RI, melaporkan situasi COVID-19 di Indonesia mengalami tren peningkatan terutama pada 21 provinsi dalam kurun beberapa pekan terakhir. Isu ini dapat dijadikan rujukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak Upaya Kesehatan.



## COVID-19

Pemerintah belum akan melakukan pembatasan pergerakan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), di tengah kenaikan kasus COVID-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan ketentuan terkait pembatasan, sehingga sampai saat ini pemerintah tidak melakukan pembatasan pergerakan. Meskipun demikian, Budi mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan sejumlah protokol kesehatan sebagaimana dilakukan pada periode pandemi untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan, pemerintah belum akan melakukan pembatasan pergerakan dengan pertimbangan menjaga perputaran roda ekonomi nasional. Meskipun demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan dan meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Sebagai informasi, pemerintah mencatat kasus aktif COVID-19 mencapai 2.761 kasus sampai dengan 22 Desember lalu.

## Layanan Kesehatan

Pemerintah memulai proses peletakan batu pertama atau *groundbreaking* rumah sakit vertikal Kemenkes di Ibu Kota Negara (IKN). Rumah sakit ini akan difokuskan untuk memberikan pelayanan stroke dan jantung. "Nanti mestinya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, atau Amerika untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di IKN," kata Presiden Joko Widodo. Pembangunan RS IKN ini merupakan bagian dari transformasi layanan rujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di ibu kota baru Indonesia. RS ini akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan rujukan bertaraf internasional di wilayah IKN dengan layanan unggulan jantung dan stroke. RS IKN akan didukung dengan SDM kesehatan dan sarana dan prasarana yang mumpuni, termasuk *catheterization laboratory* (Cath Lab) atau layanan kateterisasi jantung di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

## Demam Berdarah

Musim hujan sangat dekat kaitannya dengan fenomena demam berdarah dengue. Genangan air hujan di berbagai tempat bisa menjadi salah satu faktor merebaknya penyakit dari nyamuk itu. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan tahun 2023, merupakan siklus 5 tahunan DBD. Tiap lima tahun ada lonjakan kasus dengue, berkaitan dengan fenomena El Nino. Sejak mendapat info dari BMKG mengenai El Nino kita langsung melakukan mitigasi untuk pencegahan DBD, dan hasilnya cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari penurunan kasus dengue dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, tercatat ada 143.000 kasus dan 1.236 kematian, sedangkan tahun ini hanya terjadi 85.900 kasus dan 683 kematian. Imran mengatakan secara garis besar, ada 3 intervensi yang dilakukan untuk menekan penyakit demam berdarah dengue ini. Yaitu intrvensi pada lingkungan, intervensi pada vektor (nyamuk), dan intervensi pada manusia.

## Stunting

Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dr. Lovely Daisy menyampaikan pencegahan kelahiran prematur dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan bagian dari pencegahan stunting di Indonesia. Berdasarkan SSGI 2022, salah satu faktor terjadinya stunting pada bayi usia 0-11 bulan adalah bayi BBLR, prematuritas, dan penyakit infeksi. Umumnya, bayi prematur di Indonesia memiliki berat lebih kecil dari yang seharusnya atau yang disebut dengan Kecil Masa Kehamilan (KMK). Tidak hanya berukuran kecil, bayi prematur terlahir dengan fungsi organ yang belum sempurna sehingga membutuhkan perhatian khusus seperti perawatan intensif. Salah satu yang mesti ditingkatkan dari untuk mencegah ini adalah deteksi dini.

## RPP Kesehatan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan Kemenkes, untuk tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang (UU) Kesehatan masih dalam proses gugatan atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian regulasi. Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar IDI, dr. Mahesa Pranadipa Maikel menyampaikan pihaknya menilai Kemenkes seolah sedang dikejar target karena ingin segera mengesahkan RPP Kesehatan. Meski begitu, dengan situasi seperti saat ini, maka percepatan tersebut hanya mengesahkan ketergesaan pemerintah tanpa pertimbangan yang matang.

## Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu COVID-19 yang menekankan pada pemerintah akan terus memantau perkembangan dan meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Isu ini dapat dijadikan rujukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak Upaya Kesehatan.